



Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Kalimantan Timur

Fajar Apriani^{1*}, Sapril Nurul Ramdanis², Herry Ansyari³, Trisna Erhandi⁴ 

^{1,2} Program Studi Administrasi Publik, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 11, 2024

Accepted May 10, 2024

Available online May 25, 2024

Kata Kunci :

Narkotika, Narkoba, Peredaran Narkoba, P4GN, Rehabilitasi.

Keywords:

Narcotics, Drugs, Drugs circulation, P4GN, Rehabilitation..



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2024 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha

ABSTRAK

Penanganan masalah Narkoba selain membutuhkan upaya pemerintah juga menempatkan masyarakat sebagai unsur pendukung penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi P4GN yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui penggunaan kombinasi teknik wawancara terstruktur, dan observasi. Mengukur keabsahan data, dipergunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Hasil penelitian yaitu pencapaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 98,54 persen dengan telah terpenuhinya tujuh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan 11 IKK melebihi target. Meskipun hal itu bermakna implementasi P4GN telah terlaksana secara akuntabel, efektif dan efisien, namun penelitian ini menyoroti bahwa penetapan target kinerja tahun 2023 menurun dibandingkan target tahun 2022 dan masih terdapat dua IKK yang tidak tercapai. Masih terdapat keterbatasan anggaran pada pelaksanaan kegiatan Bagian Pencegahan untuk edukasi P4GN, khususnya penyuluhan bagi masyarakat untuk bersih Narkoba, juga keterbatasan anggaran dan SDM pada Bidang Rehabilitasi dan Pemberantasan. Fasilitas rehabilitasi rawat jalan maupun rawat inap bagi para pecandu Narkoba di Kalimantan Timur tersedia berupa Klinik Pratama BNN Provinsi Kalimantan Timur dan Balai Rehabilitasi BNN Kota Samarinda, namun kapasitasnya masih terbatas, terlebih ketika jumlah pecandu Narkoba di Kalimantan Timur pada tahun 2023 meningkat. Selain itu, belum ada kantor BNN untuk seluruh wilayah Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur.

ABSTRACT

Handling the drug problem, apart from requiring government efforts, also places the community as an essential supporting element. This research aims to analyze the implementation of P4GN carried out by the National Narcotics Agency (BNN) of East Kalimantan Province. This research uses a qualitative descriptive method with a case study approach. Data was collected through a combination of structured interview techniques and observation. Source and time triangulation techniques were used to measure the validity of the data. The research results show that performance achievement in 2023 is 98.54 percent, with seven Activity Performance Indicators (IKK) fulfilled and 11 IKK exceeding the target. Even though this means that the implementation of P4GN has been carried out accountably, effectively, and efficiently, this research highlights that the 2023 performance target has decreased compared to the 2022 target. There are still two IKKs that still need to be achieved. There are still budget limitations in implementing the Prevention Section's activities for P4GN education, especially counseling the community to be clean from drugs, as well as limited budget and human resources in the Rehabilitation and Eradication Sector. Outpatient and inpatient rehabilitation facilities for drug addicts in East Kalimantan are available in the form of the East Kalimantan Province BNN Pratama Clinic and the Samarinda City BNN Rehabilitation Center. However, their capacity is still limited significantly when the number of drug addicts in East Kalimantan increases in 2023. Apart from that, there are no BNN offices for all districts in East Kalimantan Province..

*Corresponding author

E-mail addresses: fajar.apriani@fisip.unmul.ac.id (Fajar Apriani)

1. PENDAHULUAN

Negara-negara di dunia termasuk Indonesia masih menghadapi ancaman vital atas eksistensi negara dari adanya korupsi, nepotisme dan Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif berbahaya lainnya (Narkoba) yang merajalela. Khusus untuk masalah penyalahgunaan Narkoba, Pemerintah Indonesia memberi perhatian serius dan berupaya memberantas peredarannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kerugian terbesar dari penyalahgunaan Narkoba sungguh berbahaya bagi negara dan bangsa karena menyebabkan pelemahan karakter individu yang berakibat pada lemahnya ketahanan bangsa. Indonesia menjadi negara tujuan peredaran gelap Narkoba dikarenakan jumlah penduduk yang besar dan harga jual yang tinggi. Indonesia yang merupakan negara kepulauan juga mempermudah akses masuk penyelundupan Narkotika melalui jalur laut dengan kondisi pengawasan perbatasan laut yang lemah. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) merupakan bagian dari agenda pembangunan Prioritas Nasional ketujuh, yaitu “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”. Pemerintah menargetkan prevalensi penyalahgunaan Narkotika di tahun 2024 adalah mengalami penurunan mencapai 1,69 persen (Wahyudin & Sood, 2022). Sebab sepanjang tahun 2008 hingga 2021, angka prevalensi penyalahgunaan Narkotika selalu fluktuatif, dimana tahun 2014 – 2017 cenderung menurun sebesar 2,18 persen ke 1,77 persen tetapi kemudian di tahun 2017 – 2021 justru terjadi peningkatan (dalam <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn>, 2024). Bahkan data dari *Indonesia Drugs Report 2023* menunjukkan bahwa Indeks Nasional P4GN dalam tiga tahun terakhir yang telah menggunakan sistem pendekatan menyeluruh (*input*, proses dan *services*) tidak banyak menunjukkan perubahan, yaitu hanya pada kisaran 53 hingga 55 persen (Nurlatifah et al., 2022; Nurmalita & Megawati, 2022)v.

Berdasarkan hasil Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2022 yang telah dilakukan Balai Narkotika Nasional (BNN) Pusat diketahui bahwa prevalensi penyalahgunaan Narkoba secara nasional berada pada angka yang cukup tinggi dan menyasar usia produktif, yaitu mencapai 1,95 persen atau 3,6 juta penduduk Indonesia pada tahun 2022. Penyalahgunaan Narkoba tersebut terjadi pada rentang usia penduduk 15 hingga 64 tahun (Kepala BNN Kabupaten Rote Ndao dalam <https://rotendaokab.go.id/2022/10/27>). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika telah menjadi payung hukum dari implementasi P4GN yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah khususnya para Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota). P4GN (dalam *Indonesia Drugs Report 2022*) adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang merupakan upaya penguatan dengan mengajak masyarakat untuk membantu dan mendukung BNN dalam upaya memutus rantai peredaran gelap Narkotika. Dengan tujuan memberikan rasa aman bagi masyarakat serta menciptakan lingkungan yang bebas dan bersih dari ancaman bahaya Narkoba, maka pemerintah mengimplementasikan upaya P4GN. Upaya itu termasuk berupa peningkatan peran serta masyarakat untuk secara bersama berjuang mencapai tujuan tersebut. Upaya P4GN diimplementasikan oleh masyarakat dan *stakeholder* dalam bentuk program dan kegiatan yang menempatkan masyarakat dan *stakeholder* tidak hanya sebagai penerima manfaat program (obyek) melainkan juga sebagai pelaksana (subyek) dalam mencipkakan lingkungan yang bebas dan bersih Narkoba. Mulai dari lingkungan keluarga, pendidikan, masyarakat dan dunia kerja.

Tujuan BNN tertuang di dalam Rencana Strategis BNN Tahun 2020 – 2024 yaitu: 1) Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, 2) Mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas. Sedangkan sasaran strategis BNN yaitu: 1) Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, 2) Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif dan proporsional serta berkinerja tinggi. Adapun visi yang ditetapkan BNN untuk tahun 2020 – 2024 adalah “mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan Narkotika dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Untuk tahun 2023, Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba, yang hasilnya menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan Narkotika sepanjang tahun 2023 adalah 1,73 persen yang mengandung arti dari 10.000 orang penduduk Indonesia berusia 15 – 64 tahun, terdapat 173 orang yang terpapar Narkotika selama satu tahun terakhir. Hal ini setara dengan 3,337 juta jiwa penduduk berusia 15 – 64 tahun, dimana jumlah penduduk Indonesia pada usia tersebut pada tahun 2023 adalah sebanyak 192.937.354 jiwa (LKIP BNN Provinsi Kalimantan Timur, 2023) (Nurlatifah et al., 2022; Nurmalita & Megawati, 2022; Yuliandrie & Yuliati, 2023). Hasil Survei tersebut juga menunjukkan bahwa angka prevalensi pernah pakai penyalahguna narkotika tahun 2023 adalah 2,20 persen yang mengandung arti dari 10.000 orang penduduk Indonesia berusia 15 – 64 tahun, terdapat 220 orang yang pernah

terpapar Narkotika. Hal ini setara dengan 4,24 juta jiwa penduduk berusia 15 – 64 tahun. Namun demikian, terjadi penurunan prevalensi penyalahgunaan Narkotika pada tahun 2023 (3,337 juta jiwa) dibandingkan tahun 2021 (3,662 juta jiwa) atau sebesar 11,28 persen dalam setahun pakai dan 10,93 persen pernah pakai (LKIP BNN Provinsi Kalimantan Timur, 2023). Penurunan tersebut diduga terkait dengan menurunnya kasus Orang Dengan HIV (ODHIV) dalam beberapa tahun terakhir (Kemenkes, 2022).

Dalam rangka P4GN, BNN memiliki sejumlah langkah strategis, antara lain mengimplementasikan strategi *soft power approach*, *hardpower approach*, *smart power approach* dan *cooperation*. *Soft power approach* dilakukan BNN melalui tindakan preventif agar masyarakat memiliki ketahanan diri dan daya tangkap terhadap penyalahgunaan Narkoba. Strategi ini dilaksanakan dalam bentuk Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) yang gencar dikampanyekan oleh BNN. Selain itu BNN juga membangun ketahanan diri keluarga dan upaya rehabilitasi bagi para pecandu atau korban penyalahgunaan Narkoba. Aksesibilitas layanan rehabilitasi juga dilakukan melalui Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Strategi *hardpower approach* dimaknai sebagai pendekatan yang menitikberatkan pada pemberantasan, dalam hal ini berkenaan dengan penegakan hukum yang tegas dan terukur. Dalam strategi ini, BNN berkolaborasi dengan aparat penegak hukum dalam hal melakukan tindakan tegas bagi para pelaku kejahatan tindak pidana Narkoba melalui pemberian sanksi hukum yang setimpal, dari adanya pengungkapan jaringan sindikat yang telah berhasil dipetakan. Dalam strategi *hardpower approach* BNN juga melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan Program *Alternative Development* yang membantu masyarakat yang berada di kawasan rawan Narkoba agar memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kawasan rawan Narkoba. Pada implementasi strategi *smart power approach*, BNN memanfaatkan penggunaan teknologi informasi sesuai perkembangan di era digital saat ini, dimana penyalahgunaan Narkoba telah pula mengikuti perkembangan itu dalam 'pasar' produknya. Penggunaan berbagai media sosial dan pemanfaatan berbagai bentuk teknologi informasi lainnya tentu sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN dalam memerangi Narkoba (Latifah & Maesaroh, 2020). Sedangkan pada implementasi strategi *corporation*, BNN menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Penelitian ini mengurai sejauhmana BNN Provinsi Kalimantan Timur mengimplementasikan P4GN di wilayah provinsinya hingga ketercapaiannya. Sebagai bagian dari pengemban tugas P4GN di tingkat daerah, maka BNN Provinsi Kalimantan Timur sudah semestinya melakukan upaya-upaya penanggulangan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi P4GN. Berbeda dengan penelitian terdahulu mengenai implementasi P4GN yang hanya membatasi pada sasaran penyalahgunaan Narkoba pada kalangan tertentu atau hanya membatasi lokasi penelitiannya pada satu BNN Kabupaten/Kota saja (Nurmalita & Megawati, 2022). Penelitian ini tidak membatasi obyek sasaran dari upaya P4GN yang dilakukan dan mengambil lokus penelitian pada BNN di tingkat wilayah Provinsi.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini berupaya untuk memahami fenomena sosial atas tingginya kasus peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian dilakukan selama satu tahun lebih, yakni sejak akhir tahun 2022 hingga akhir tahun 2023 untuk melihat perkembangan pencapaian kinerja BNN Provinsi Kalimantan Timur dalam mengimplementasikan P4GN. Data dikumpulkan melalui penggunaan kombinasi teknik wawancara terstruktur, observasi atas perkembangan kasus peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, observasi terhadap fasilitas rehabilitasi bagi para pengguna Narkoba, dokumentasi dan pemanfaatan data sekunder atas pelaksanaan program dan kegiatan BNN Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka P4GN. Untuk mengukur keabsahan data, dipergunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Kepala Bagian Umum BNN Provinsi Kalimantan Timur menjadi sumber data primer dalam penelitian ini dan berposisi sebagai key informant. Data yang telah terkumpul berkenaan dengan implementasi P4GN yang telah dilakukan oleh BNN Provinsi Kalimantan Timur sepanjang tahun 2023 dari capaian sasaran kegiatan yang mencakup bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, pemberantasan hingga manajemennya dianalisis dengan menggunakan alat analisis data model interaktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur berdiri sejak tahun 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Timur. Adapun tugas pokok BNN Provinsi Kalimantan

Timur adalah membantu Gubernur dalam melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, P4GN, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya di daerah. BNN Provinsi Kalimantan Timur terletak di Jalan Rapak Indah Km.1 Nomor 57, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan tugas pokok BNN Provinsi Kalimantan Timur dalam P4GN mengacu pada kebijakan nasional yang tertuang di dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota. Selain itu, pelaksanaan tugas pokok BNN Provinsi Kalimantan Timur dalam P4GN juga mengacu pada kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika, yang diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2022 merupakan perubahan dari kebijakan sebelumnya yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2017.

BNN Provinsi Kalimantan Timur membawahi tiga BNN Kabupaten/Kota, yaitu BNN Kota Samarinda, BNN Kota Balikpapan dan BNN Kota Bontang. Sementara wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang luas daratannya mencapai 127.267,52 km² dan luas lautnya mencapai 25.656 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 3.752.605 jiwa, terdiri dari sepuluh Kabupaten/Kota. Tentu letak geografis Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan secara langsung dengan negara tetangga (Malaysia) menjadi tantangan tersendiri yang membutuhkan kewaspadaan tinggi, sebab batas wilayah tersebut dapat menjadi pintu masuk penyelundupan dan peredaran gelap Narkoba yang sangat rawan bagi keamanan negara. Realisasi kinerja BNN Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya P4GN telah ditetapkan dengan sasaran strategis meningkatkan penanganan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, mewujudkan manajemen organisasi yang profesional, produktif dan proporsional serta berkinerja tinggi sesuai tugas pokok dan fungsinya. Maka untuk mencapai sasaran strategis tersebut, BNN Provinsi Kalimantan Timur memiliki Rencana Program Kerja (Renpoja) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis BNN Tahun 2020 – 2024, dimana *focal point* programnya adalah Program P4GN dan Program Dukungan Manajemen serta pelaksanaan tugas teknis lainnya. Implementasi P4GN oleh BNN Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Rencana Program Kerja BNN Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 dimana Perjanjian Kerja Tahun 2023 telah menetapkan 14 sasaran kegiatan dengan 20 indikator kinerja kegiatan. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BNN Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 diketahui pencapaian sasaran kegiatan beserta indikatornya dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari Sasaran Kegiatan P4GN BNN Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kab/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan Narkoba berkategori Tinggi di wilayah Provinsi	2 Kab/Kota	4 Kab/Kota	200
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	Jumlah kab/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori Tinggi di wilayah Provinsi	2 Kab/Kota	4 Kab/Kota	200
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kab/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori Mandiri di wilayah Provinsi	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan Narkoba secara berkelanjutan	a) Jumlah kawasan rawan di wilayah Provinsi yang beralih status dari Bahaya menjadi Waspada	1 kawasan/wilayah rawan	1 kawasan/wilayah rawan	100
		b) Nilai Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan (IKKR) yang diintervensi	2,52	2,80	111
5	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	63 %	74,44 %	118,16
6	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	a) Jumlah petugas penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terlatih	40 orang	64 orang	160
		b) Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5 orang	7 orang	140
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi Narkoba	a) Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Provinsi	2 lembaga	2 lembaga	100
		b) Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi	2 unit	2 unit	100
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi Narkoba di Klinik Rehabilitasi	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi	3,6	3,69	102,5
9	Meningkatnya pemetaan karingan peredaran gelap Narkoba dan prekursor Narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap Narkoba dan prekursor yang berhasil dipetakan	1 jaringan	3 jaringan	300
10	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana Narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana Narkoba yang P-21	24 berkas perkara	48 berkas perkara	200
11	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti Narkoba	a) Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan	100	100	100
		b) Nilai tingkat keamanan barang bukti Narkoba dan non Narkoba	100	100	100
12	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	a) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BNN Provinsi Kalimantan Timur	92	90,66	98,54
		b) Jumlah BNN Kab/Kota di wilayah Provinsi dengan NKA mencapai target	3	2	66,7

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
13	Meningkatnya tata Kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	a) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Kalimantan Timur	92	98,85	107
		b) Jumlah BNN Kab/Kota di wilayah Provinsi dengan nilai IKPA mencapai target	3	3	100
14	Meningkatnya pengelolaan Reformasi Birokrasi unit kinerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal	75	76,22	101,6

Sumber: Diolah dari LKIP BNN Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Berdasarkan [Tabel 1](#), uraian lebih lanjut tentang implementasi P4GN oleh BNN Provinsi Kalimantan Timur terjabar. Pertama, **implementasi P4GN melalui Kegiatan Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat**. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat berjumlah lima, antara lain jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori Tinggi di wilayah Provinsi. Tercapai 4 Kabupaten/Kota dari 2 target Kabupaten/Kota. Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori Tinggi di wilayah Provinsi. Tercapai 4 Kabupaten/Kota dari 2 target Kabupaten/Kota. Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori Mandiri di wilayah Provinsi. Tercapai 3 Kabupaten/Kota dari 3 target. Jumlah kawasan rawan di wilayah Provinsi yang beralih status dari Bahaya menjadi Waspada. Tercapai 1 kawasan dari 1 target. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang Diintervensi. Tercapai nilai 2,8 dari target nilai 2,52. Mengacu pada dokumen LKIP BNN Provinsi Kalimantan Timur (2023), keberhasilan implementasi P4GN oleh BNN Provinsi Kalimantan Timur melalui pemenuhan sasaran kegiatan meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruh penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dengan tercapai sebesar 200 persen karena empat Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur telah memenuhi Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba dalam kategori Tinggi (pada skala 49,74 – 53,70), antara lain pada BNN Provinsi Kalimantan Timur, BNN Kota Samarinda, BNN Kota Balikpapan dan BNN Kota Bontang (lihat [Tabel 2](#)). Indeks Ketahanan Diri Remaja tersebut merujuk pada nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindari dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkoba. Rekapitulasi Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori Tinggi di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 disajikan pada [Tabel 2](#).

Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori Tinggi di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Satuan Kerja	Indeks Target	Realisasi	Kategori
1	BNN Prov. Kaltim	53	53,24	Tinggi
2	BNN Kota Samarinda	53	56,56	Sangat Tinggi
3	BNN Kota Balikpapan	53	52,75	Tinggi
4	BNN Kota Bontang	53	53,75	Sangat Tinggi

Sumber: LKIP BNN Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Pada tahun 2022, Kabupaten/Kota yang memenuhi Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba dalam kategori Tinggi adalah BNN Kota Balikpapan dan BNN Kota Bontang. Pada tahun 2023, capaian indikator ini mengalami peningkatan dimana BNN Kota Samarinda dan BNN Kota Bontang mencapai Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba dalam kategori Sangat Tinggi. Dari perhitungan indeks tersebut diketahui bahwa pemahaman dan kesadaran remaja akan bahaya penyalahgunaan Narkoba mengalami peningkatan, tingkat kepedulian masyarakat terhadap pemerintah dalam upaya P4GN juga tinggi, peran mitra masyarakat dalam upaya P4GN juga meningkat, koordinasi tingkat pusat dalam hal fasilitasi juga meningkat. Fasilitasi dari pusat dalam hal ini meliputi bimbingan teknis, penyajian materi dan acuan pelaksanaan informasi dan edukasi P4GN. Namun demikian, dalam pemenuhan indikator kinerja jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Diri

Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori Tinggi masih dihiasi kendala atau hambatan, yaitu gangguan dari aplikasi dan internet untuk pengisian aplikasi Dektari aja. Belum maksimalnya kesadaran masyarakat untuk mencari dan mendapatkan informasi P4GN. Masih rendahnya kesadaran responden dalam pengisian aplikasi Dektari aja. Tidak semua penyuluh melakukan pengisian aplikasi Dektari aja. Keberhasilan implementasi P4GN oleh BNN Provinsi Kalimantan Timur melalui pemenuhan sasaran kegiatan meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruh penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dengan tercapai sebesar 200 persen karena empat Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur telah memenuhi Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba dalam kategori Tinggi (pada skala 76,61 – 88,30), antara lain pada BNN Provinsi Kalimantan Timur, BNN Kota Samarinda, BNN Kota Balikpapan dan BNN Kota Bontang disajikan pada [Tabel 3](#). Indeks Ketahanan Keluarga tersebut merujuk pada nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan Narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal.

Tabel 3. Rekapitulasi Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori Tinggi di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Satuan Kerja	Indeks Target	Realisasi	%	Kategori
1	BNN Prov. Kaltim	78,69	92,143	117,09	Sangat Tinggi
2	BNN Kota Samarinda	78,69	85,000	108,02	Tinggi
3	BNN Kota Balikpapan	78,69	92,321	117,32	Sangat Tinggi
4	BNN Kota Bontang	78,69	80,714	102,57	Tinggi

Sumber: LKIP BNN Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Pada tahun 2022, Kabupaten/Kota yang memenuhi Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba dalam kategori Tinggi adalah BNN Provinsi Kalimantan Timur dan BNN Kota Balikpapan. Pada tahun 2023, capaian indikator ini mengalami peningkatan dimana Provinsi Kalimantan Timur dan BNN Kota Balikpapan mencapai Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba dalam kategori Sangat Tinggi. Dari perhitungan indeks tersebut diketahui bahwa pemahaman dan kesadaran keluarga akan bahaya penyalahgunaan Narkoba mengalami peningkatan, tingkat kepedulian masyarakat terhadap pemerintah dalam upaya P4GN juga tinggi, peran mitra masyarakat dan *stakeholder* dalam upaya P4GN juga meningkat, koordinasi tingkat pusat dalam hal fasilitasi juga meningkat. Fasilitasi dari pusat dalam hal ini meliputi bimbingan teknis, penyajian materi dan acuan pelaksanaan informasi dan edukasi P4GN. Namun demikian, dalam pemenuhan indikator kinerja jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori Tinggi masih dihiasi kendala atau hambatan, yaitu masih terdapat target wilayah dengan prioritas kerawanan daerah pada wilayah Kabupaten/Kota yang belum memiliki BNN. Keberhasilan implementasi P4GN oleh BNN Provinsi Kalimantan Timur melalui pemenuhan sasaran kegiatan meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN dengan tercapai sebesar 100 persen karena tiga Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur telah memenuhi Indeks Kemandirian Partisipasi dalam kategori Mandiri (pada skala 2,51 – 3,25), antara lain pada BNN Provinsi Kalimantan Timur, BNN Kota Samarinda, BNN Kota Balikpapan dan BNN Kota Bontang disajikan pada [Tabel 4](#). Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) tersebut merujuk pada nilai capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para pegiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, Organisasi Sosial Masyarakat, LSM, paguyuban, dan sebagainya) serta masyarakat rawan dan rentan Narkoba.

Tabel 4. Rekapitulasi Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori Mandiri di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Satuan Kerja	Indeks Kemandirian Partisipasi	Kategori
1	BNN Prov. Kaltim	3,56	Sangat Mandiri
2	BNN Kota Samarinda	3,65	Sangat Mandiri
3	BNN Kota Balikpapan	3,56	Sangat Mandiri
4	BNN Kota Bontang	3,82	Sangat Mandiri
Total		3,64	Sangat Mandiri

Sumber: LKIP BNN Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Pada tahun 2022 maupun tahun 2023, Kabupaten/Kota yang memenuhi Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) dalam kategori Mandiri sama pencapaiannya. Capaian indikator ini telah terpenuhi karena telah terlaksananya jalinan kerjasama dengan dokumen *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan berbagai instansi/lembaga yang telah dilaksanakan pada tingkat BNN Pusat yang berlanjut pada Perjanjian Kerjasama pada tingkat BNN Kabupaten/Kota dengan instansi/lembaga di tingkat daerah; terdapat pemberian apresiasi kepada instansi pemerintah dan dunia usaha serta lingkungan pendidikan yang berpartisipasi dalam pelaksanaan P4GN secara mandiri; serta terdapat pembinaan yang berkelanjutan bagi para pegawai atau pekerja yang menjadi Penggiat Anti Narkoba.

Kedua, **implementasi P4GN melalui Kegiatan Rehabilitasi**. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk Bidang Rehabilitasi berjumlah tiga, yaitu persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup. Tercapai persentase sebesar 74,44 persen dari target 63 persen. Jumlah petugas penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terlatih. Tercapai 64 orang dari target 40 orang. Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis. Tercapai tujuh orang dari target lima orang. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Provinsi. Tercapai dua lembaga dari target dua lembaga. Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi. Tercapai dua unit dari target dua unit. Nilai Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Timur. Tercapai nilai 3,69 dari target nilai 3,60. Keberhasilan implementasi P4GN oleh BNN Provinsi Kalimantan Timur melalui pemenuhan sasaran kegiatan meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba, untuk indikator persentase penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup tercapai sebesar 118,16 persen. Penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba dinilai mengalami peningkatan kualitas hidup adalah ketika mengikuti kegiatan rehabilitasi berkelanjutan di Klinik Pratama BNN Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan selesainya program. Total jumlah klien yang mengikuti layanan Rehabilitasi Berkelanjutan pada tahun 2023 adalah sejumlah 121 orang yang berasal dari klien rawat jalan Klinik Pratama maupun rujukan dari residen selesai Rawat Inap pada Balai Rehabilitasi Tanah Merah BNN Kota Samarinda. Namun, kapasitas Balai Rehabilitasi masih terbatas.

Terkait dengan upaya pencapaian sasaran kegiatan pada pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba tersebut, tentu tidak terlepas dari keberhasilan implementasi P4GN oleh BNN Provinsi Kalimantan Timur melalui pemenuhan sasaran kegiatan meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi. Untuk indikator jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih ketercapaiannya sangat tinggi, yaitu sebesar 160 persen. Sedangkan untuk indikator jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis ketercapaiannya sebesar 140 persen. Berkenaan dengan indikator ini, yang dimaksud dengan petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan teknis tata laksana layanan IBM serta mampu melakukan layanan IBM. Parameternya adalah telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan IBM hingga memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan IBM yang dilaksanakan oleh BNN Provinsi Kalimantan Timur maupun BNN Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Timur. Sedangkan untuk yang dimaksud petugas lembaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi adalah petugas pelaksana layanan rehabilitasi yang telah mengikuti peningkatan kompetensi teknis dan tersertifikasi sesuai bidangnya (dokter, perawat, konselor adiksi, psikolog, pekerja sosial). Parameternya telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan rehabilitasi Narkoba hingga memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi Narkoba atau uji kompetensi konselor adiksi yang dilaksanakan oleh LSP BNN Provinsi Kalimantan Timur dengan dukungan anggaran dari DIPA BNN Provinsi Kalimantan Timur. Apabila dibandingkan dengan jumlah petugas penyelenggara layanan IBM pada tahun 2022 yang sebanyak 25 orang, maka jumlah petugas penyelenggara layanan IBM tahun 2023 jauh lebih banyak sebab mencapai 64 orang. Namun, untuk jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis antara tahun 2022 dan 2023 berada pada jumlah yang sama, yaitu tujuh orang. Bedanya, target pada tahun 2022 lebih tinggi dimana jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis adalah delapan orang, sedangkan penetapan target di tahun 2023 jauh lebih rendah dengan memasang target hanya lima orang. Dalam pelaksanaan pelatihan teknis layanan rehabilitasi padahal terdapat 15 orang peserta, namun yang berhasil tersertifikasi hanya tujuh orang. Temuan dalam pelaksanaannya, asesor tidak transparan dalam menyampaikan penyebab peserta tidak lulus uji kompetensi.

Terkait dengan pelaksanaan pembekalan dan pelatihan teknis tata laksana layanan IBM maupun layanan rehabilitasi untuk pemenuhan sasaran meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi, BNN Provinsi Kalimantan Timur melaporkan masih terkendala oleh adanya anggaran yang terblokir untuk dapat dipergunakan. BNN Provinsi Kalimantan Timur memandang bahwa pemblokiran anggaran seharusnya dilakukan pada pengurangan biaya penginapan, konsumsi rapat, sertifikat, honor asesor,

penyesuaian nilai dan uang harian paket *meeting fullboard* peserta dan panitia (LKIP BNN Provinsi Kalimantan Timur, 2023). Selain berhubungan dengan kapasitas tenaga teknis rehabilitasi, sasaran kegiatan tentang pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba tentu juga tidak terlepas dari keberhasilan implementasi P4GN oleh BNN Provinsi Kalimantan Timur melalui pemenuhan sasaran kegiatan meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi Narkoba. Untuk indikator jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Provinsi tercapai sebesar 100 persen dengan tersedianya dua lembaga, yaitu Puskesmas Bontang Utara I dan Rumah Sakit Taman Husada Bontang. Hasil penilaian SNI kedua lembaga tersebut adalah memenuhi syarat untuk SNI Tipe A. Demikian pula untuk indikator jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM di wilayah Provinsi tercapai sebesar 100 persen dengan tersedianya dua unit, yaitu IBM Tanjung Limau dan IBM Batu Kajang. IBM Tanjung Limau berlokasi di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan IBM Batu Kajang berlokasi di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser. Penetapan target maupun realisasi kedua indikator tersebut adalah sama untuk tahun 2022 maupun 2023.

Ketiga, **implementasi P4GN melalui Kegiatan Pemberantasan dan Intelijen**. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk Bidang Pemberantasan dan Intelijen berjumlah empat, yaitu jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan. Tercapai sebanyak tiga jaringan dari target satu jaringan. Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21. Tercapai sebanyak 48 berkas perkara dari target 24 perkara. Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan. Tercapai sebesar 100 persen dari target 100 persen. Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika. Tercapai sebesar 100 persen dari target 100 persen. Keberhasilan implementasi P4GN oleh BNN Provinsi Kalimantan Timur melalui pemenuhan sasaran kegiatan meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap Narkoba dan prekursor Narkoba pada tahun 2023 tercapai sebesar 300 persen karena terdapat tiga jaringan peredaran gelap Narkoba dan prekursor Narkoba yang berhasil dipetakan, dari satu jaringan yang ditargetkan. Keberhasilan ini berkat adanya kerjasama yang baik dan profesional yang disertai integritas yang tinggi antara personil bidang pemberantasan dengan penegak hukum dari instansi lainnya. Namun demikian, dilaporkan oleh BNN Provinsi Kalimantan Timur bahwa penambahan jumlah personil intelijen di Bidang Pemberantasan pada BNN Provinsi Kalimantan Timur masih diperlukan, baik dari BNN Pusat maupun dari pihak TNI/Polri. Dukungan anggaran juga dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan Intelijen Taktis dan Operasional yang lebih optimal, sebab selama ini intelijen di lingkungan BNN Provinsi Kalimantan Timur belum didukung oleh anggaran untuk hal tersebut. Keberhasilan implementasi P4GN oleh BNN Provinsi Kalimantan Timur juga terpenuhi dari capaian sasaran kegiatan meningkatnya pengungkapan tindak pidana Narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya sebesar 200 persen. Indikator dari pencapaian sasaran kegiatan ini adalah terdapat 48 berkas perkara tindak pidana Narkoba yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa untuk dilakukan penuntutan (disebut dengan berkas perkara P-21), dari target sejumlah 24 berkas perkara disajikan pada [Tabel 5](#). Pada tahun 2022, target untuk berkas perkara tindak pidana Narkoba berada pada jumlah yang sama, yaitu 24 berkas perkara, namun terealisasi sebanyak 49 berkas. Dengan demikian, capaian pada tahun 2023 untuk indikator ini sebenarnya mengalami sedikit penurunan.

Tabel 5. Rekapitulasi Jumlah Berkas Kasus Tindak Pidana Narkoba yang P-21 di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Satuan Kerja	Target Kasus	Realisasi Kasus
1	BNN Prov. Kaltim	14	22
2	BNN Kota Samarinda	4	13
3	BNN Kota Balikpapan	4	9
4	BNN Kota Bontang	2	4
Total		24	48

Sumber: LKIP BNN Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Keberhasilan dalam capaian IKK pengungkapan tindak pidana Narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya ditentukan oleh sikap profesional dan tanggungjawab Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Kalimantan Timur beserta jalinan kerjasama antar instansi dalam melakukan penindakan, penyidikan dan penyelesaian perkara tindak pidana Narkoba, termasuk dengan pihak Kejaksaan. Standar Operasional Penyidikan juga merupakan faktor utama dalam pelaksanaan penyelesaian berkas perkara yang memungkinkan kecepatan, kesederhanaan dan minim anggaran. Untuk keberhasilan implementasi P4GN oleh BNN Provinsi Kalimantan Timur melalui pemenuhan sasaran kegiatan meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti Narkoba pada tahun

2023 tercapai sebesar 100 persen untuk setiap indikator. Indikator dari pencapaian sasaran ini meliputi: 1) Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan, dan 2) Nilai tingkat keamanan barang bukti Narkotika dan non Narkotika. Keempat, **implementasi P4GN melalui Kegiatan Umum**. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk Bidang Umum berjumlah empat dari dua sasaran kegiatan dengan nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Kalimantan Timur. Tercapai nilai 90,66 dari target nilai 92. Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi. Tercapai nilai dua BNN Kota dari target nilai tiga BNN Kabupaten/Kota. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Kalimantan Timur. Tercapai nilai 98,85 dari target nilai 92. Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi. Tercapai tiga BNN Kabupaten/Kota dari target tiga BNN Kabupaten/Kota. Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan Penilaian Internal. Tercapai nilai 76,72 dari target nilai 75. Secara keseluruhan, pencapaian keberhasilan P4GN oleh BNN Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 menyatakan bahwa terdapat dua target IKK yang tidak tercapai, dimana keduanya terletak pada sasaran kegiatan pada Bidang Umum. Keberhasilan pemenuhan sasaran kegiatan meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien pada tahun 2023 terdiri atas dua indikator. *Pertama*, Nilai Kinerja Anggaran (NKA). NKA pada tahun 2023 yang ditargetkan mencapai nilai indeks 92 hanya terealisasi dalam nilai indeks 90,66 atau tercapai sebesar 98,5 persen. Anggaran kinerja BNN Provinsi Kalimantan Timur berasal dari APBN. Perhitungan NKA sudah terintegrasi pada aplikasi SMART yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan guna memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan anggaran. *Kedua*, jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi yang ditargetkan ada tiga BNN Kabupaten/Kota baru terealisasi dua BNN Kabupaten/Kota atau tercapai sebesar 66,7 persen saja disajikan pada [Tabel 6](#).

Tabel 6. Nilai Kinerja Anggaran BNN di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Satuan Kerja	Target NKA	Realisasi NKA
1	BNN Prov. Kaltim	92	90,66
2	BNN Kota Samarinda	88	86,02
3	BNN Kota Balikpapan	83	89,39
4	BNN Kota Bontang	84	85,11
Total		3 BNN Kab/Kota	2 BNN Kab/Kota

Sumber: LKIP BNN Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

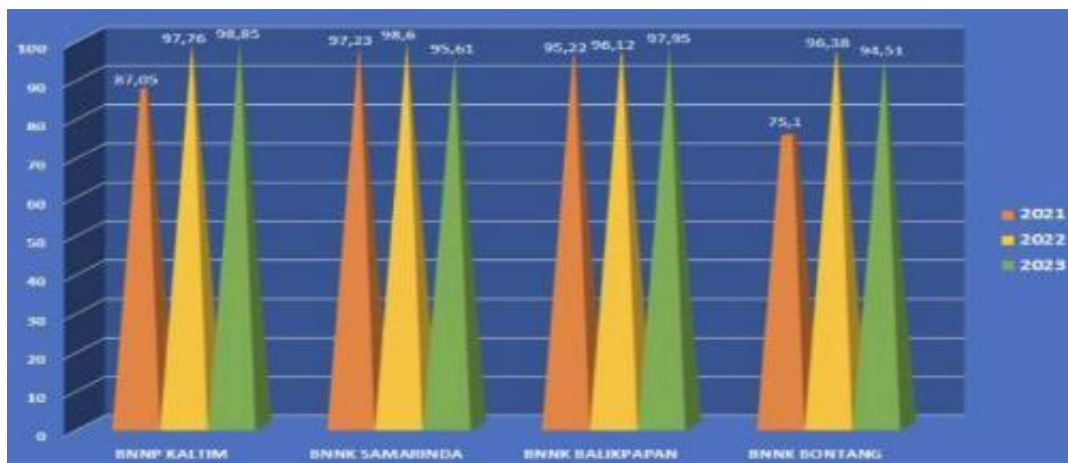
Apabila diperbandingkan dengan capaian kinerja P4GN di wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022, NKA BNN Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 justru menurun sebab NKA pada tahun 2022 mencapai nilai indeks 98,61 persen. Namun untuk NKA BNN Kabupaten/Kota, capaian tahun 2023 lebih baik daripada tahun 2022 yang lebih rendah sebab tidak mencapai target NKA. Meskipun pada tahun 2023 realisasi pada 3 BNN Kabupaten/Kota juga belum tercapai. Hal ini menunjukkan pada temuan penelitian bahwa NKA dalam upaya P4GN oleh BNN di wilayah Provinsi Kalimantan Timur membutuhkan optimalisasi yang lebih baik. Keberhasilan implementasi P4GN oleh BNN Provinsi Kalimantan Timur yang dijabarkan berikutnya adalah pada pencapaian sasaran meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur. Pencapaian sasaran ini mencakup dua capaian IKK. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang sebesar 107 persen dan Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dengan nilai IKPA mencapai target sebesar 100 persen disajikan pada [Tabel 7](#).

Tabel 7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Satuan Kerja	Target Nilai IKPA	Realisasi Nilai IKPA
1	BNN Prov. Kaltim	92	98,85
2	BNN Kota Samarinda	92	95,61
3	BNN Kota Balikpapan	92	97,95
4	BNN Kota Bontang	92	94,51
Total		3 BNN Kab/Kota	3 BNN Kab/Kota

Sumber: LKIP BNN Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Data pada [Tabel 7](#) menunjukkan bahwa tiga BNN Kabupaten/Kota telah melebihi target nilai IKPA yang telah ditetapkan. Namun demikian, penetapan target nilai IKPA pada tahun 2023 menurun dari target pada tahun 2022 yang berada pada nilai target IKPA 95. Dalam perkembangan tiga tahun terakhir, nilai IKPA BNN di wilayah Provinsi Kalimantan Timur tampak fluktuatif dilihat pada [Gambar 3](#).



Gambar 3. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 - 2023

Sumber: LKIP BNN Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Memahami data IKPA BNN di wilayah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 – 2023 dapat diketahui bahwa nilai IKPA tertinggi ada pada BNN Provinsi Kalimantan Timur sedangkan nilai IKPA BNN Kota Bontang adalah yang terendah di tahun 2021, namun kemudian mengalami peningkatan sangat tajam pada tahun 2022. Untuk tahun 2022, nilai IKPA BNN Provinsi Kalimantan Timur masih menjadi yang tertinggi, sedangkan nilai IKPA BNN Kota Balikpapan adalah yang terendah. BNN Provinsi Kalimantan Timur masih mencapai nilai IKPA tertinggi kembali pada tahun 2023, sedangkan nilai IKPA terendah berada pada BNN Kota Bontang kembali. Dari 20 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah diuraikan di atas, diketahui capaian kinerja BNN Provinsi Kalimantan Timur melebihi target sebanyak 11 IKK, mencapai target sebanyak tujuh IKK dan target dua IKK tidak tercapai. Apabila dipersentasikan, pencapaian kinerja BNN Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 adalah sebesar 98,54 persen (LKIP BNN Provinsi Kalimantan Timur, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program P4GN telah terlaksana secara akuntabel, efektif dan efisien melalui kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai *stakeholder* Provinsi Kalimantan Timur.

Khusus untuk IKK Bidang Rehabilitasi, wilayah Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki hambatan pada keterbatasan Balai Rehabilitasi untuk para penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba. Dari segi penggunaan anggaran, pada tahun 2023 BNN Provinsi Kalimantan Timur sebagai lembaga pemerintah non Kementerian telah berhasil melaksanakan berbagai kegiatan dengan penggunaan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 99,37 persen dengan nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 98,85 persen (LKIP BNN Provinsi Kalimantan Timur, 2023). Apabila diperincikan, pagu anggaran BNN Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp.8.163.467.000,- dan realisasinya adalah sebesar Rp.8.111.989.228,- sehingga sisa anggaran adalah sebesar Rp.51.477.772,- atau 0,63 persen saja. Perincian penggunaan keseluruhan anggaran untuk BNN Provinsi Kalimantan Timur dan BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan Timur tercatat adalah sebesar Rp.14.278.095.000,- dan realisasinya adalah sebesar Rp.14.177.300.956,- atau 99,29 persen. Sisa anggarannya adalah sebesar Rp.100.794.044,- atau 0,71 persen (LKIP BNN Provinsi Kalimantan Timur, 2023). Namun, terdapat pula keterlibatan pihak swasta di dalam penyediaan anggaran untuk P4GN. Disamping itu, BNN juga telah melakukan pengukuran tingkat kepercayaan masyarakat melalui Survei Indeks Kepercayaan Masyarakat Tahun 2023 yang menghasilkan data bahwa Indeks Kepercayaan Masyarakat adalah sebesar 87,27 yang termasuk dalam kategori Sangat Baik (dalam skala 84,01 – 100). Untuk Indeks Kepercayaan Masyarakat Kalimantan Timur terhadap BNN Provinsi Kalimantan Timur, dihasilkan data sebesar 89,46, dimana nilai tersebut melampaui Indeks Kepercayaan Masyarakat secara nasional. BNN Provinsi Kalimantan Timur juga termasuk satu dari 10 BNN Provinsi yang menunjukkan peningkatan angka indeks dari 88,02 pada tahun 2022 (LKIP BNN Provinsi Kalimantan Timur, 2023). Angka Indeks Kepercayaan Masyarakat yang berada pada kategori Sangat Baik memberikan arti bahwa masyarakat memberikan kepercayaan yang sangat tinggi terhadap BNN dalam menanggulangi P4GN melalui setiap programnya. Terlebih pada IKK Bidang Rehabilitasi BNN juga menyediakan aksesibilitas layanan rehabilitasi melalui Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).



Gambar 4. Layanan Terpadu Lamin BNN Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: Dokumentasi penelitian, 2023.

Hal ini merupakan bentuk kepercayaan masyarakat yang sangat besar kepada BNN untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di kehidupan masyarakat akibat adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba khususnya di Provinsi Kalimantan Timur dan umumnya di Indonesia. Namun demikian, upaya P4GN oleh BNN membutuhkan kolaborasi yang sinergis dengan berbagai *stakeholder* untuk dapat mencapai tujuannya.

Pembahasan

Narkotika sebagai permasalahan multidimensi yang sangat kompleks tentu saja berkaitan dengan urusan hukum, keamanan negara, kesehatan, ekonomi maupun sosial. Sejak awal masa kepemimpinan Presiden RI ke tujuh, Joko Widodo, penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba telah menjadi fokus pemerintah sehubungan dengan pernyataan Indonesia Darurat Narkoba. BNN menjadi lembaga negara yang mengemban tugas P4GN sesuai amanat Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020 - 2024. Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah diamanahkan untuk berkolaborasi secara sinergis dengan BNN dalam implementasi Program P4GN. Upaya strategis BNN Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan P4GN dilakukan melalui program dan kegiatan dari empat bidang utama yang terdiri dari Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, Bidang Pemberantasan dan Intelijen, serta Bidang Umum sebagai pendukung manajemen. Strategi dipergunakan sebagai pola pengalokasian sumberdaya yang memungkinkan agar organisasi dapat mempertahankan kinerjanya (Barney, 1997). Dalam hal P4GN, BNN mempergunakan empat strategi yaitu *soft power approach*, *hardpower approach*, *smart power approach* dan *cooperation*, yang tercakup di dalam kegiatan pada bidang-bidang tersebut. BNN Provinsi Kalimantan Timur memiliki 20 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam upaya P4GN. Dari 20 IKK tersebut, diketahui capaian kinerja BNN Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 melebihi target sebanyak 11 IKK, mencapai target sebanyak tujuh IKK dan target dua IKK tidak tercapai. Apabila dipersentasekan, pencapaian kinerja BNN Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 adalah sebesar 98,54 persen (LKIP BNN Provinsi Kalimantan Timur, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program P4GN telah terlaksana secara akuntabel, efektif dan efisien melalui kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai *stakeholder* di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Implementasi kegiatan pada Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan wujud penerapan strategi *soft power approach* yang dilakukan oleh BNN. Strategi *soft power approach* adalah pendekatan yang menitikberatkan pada aktivitas rehabilitasi dan pencegahan yang bertujuan agar masyarakat memiliki ketahanan diri dan daya tangkal terhadap penyalahgunaan Narkoba (Latifah & Maesaroh, 2020; Yuliandrie & Yuliati, 2023). Butir pencegahan di dalam strategi ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan edukasi P4GN melalui pendidikan dan latihan, diskusi publik, hingga penyebaran informasi melalui berbagai media. Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) juga termasuk di dalamnya, yang gencar dikampanyekan oleh BNN. Selain itu BNN juga membangun ketahanan diri keluarga para pecandu atau korban penyalahgunaan Narkoba. Dalam pelaksanaan sosialisasi dan edukasi P4GN kepada masyarakat, BNN mengkombinasikan strategi *soft power approach* dengan strategi *smart power approach*. Dimana strategi *smart power approach* dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang

maksimal di era digital dalam rangka mendukung upaya P4GN di Indonesia (Nurmalita & Megawati, 2022; D. S. Putra, 2022). Maka dari itu, pemanfaatan media sungguh memiliki peran dalam perluasan edukasi tentang P4GN bagi masyarakat. Menganalisis secara lebih tajam terkait dengan Kawasan Rawan Narkoba, diketahui bahwa berdasarkan *Indonesia Drugs Report 2022* yang dilakukan oleh Pusat Penelitian, Data dan Informasi (Puslitdatin) BNN bahwa pada 2021 terdapat 166 kawasan rawan di Provinsi Kalimantan Timur yang termasuk dalam kategori Bahaya dan Waspada. Kemudian berdasarkan hasil wawancara terhadap Kepala Bagian Umum BNN Provinsi Kalimantan Timur, pada kondisi tahun 2022 kawasan rawan Narkoba di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi 181 desa, yang terdiri dari 81 desa berstatus Bahaya dan 100 desa berstatus Waspada. Maka sesungguhnya, target yang direncanakan oleh BNN Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2023 untuk IKK ini sangat kecil, sebab hanya menargetkan satu kawasan rawan yang beralih status dari Bahaya ke Waspada, padahal pada kenyataannya terdapat puluhan desa yang rawan narkoba dengan status Bahaya. Adapun indikator dari kerawanan suatu kawasan atas Narkoba antara lain dari banyaknya bandar, pengedar dan pecandu narkoba. Juga banyaknya kasus kejahatan dan kriminalitas. Ada pula indikator pendukung seperti jumlah keberadaan diskotik, hotel dan sebagainya. Maka fakta ini menjadikan BNN Provinsi Kalimantan Timur perlu meningkatkan target untuk mengubah kawasan-kawasan yang termasuk dalam kategori Bahaya dan Waspada Narkoba tersebut menjadi Kawasan Bersih Narkoba. Untuk itu, maka BNN Provinsi Kalimantan Timur perlu berupaya menggerakkan berbagai *stakeholder* dan menghimpun partisipasi aktif masyarakat dalam upaya P4GN di wilayah Kalimantan Timur secara lebih masif.

Terkait dengan keberhasilan implementasi P4GN oleh BNN Provinsi Kalimantan Timur melalui pemenuhan sasaran kegiatan meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan Narkoba secara berkelanjutan, juga terdapat ketercapaian sebesar 111 persen atas terpenuhinya Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan (IKKR) yang diintervensi. Program Pemberdayaan Alternatif yang berhasil dilakukan di Desa Batu Kajang dinilai berhasil, berlanjut, hasil dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Terdapat sinergitas instansi pemerintah, ada kemitraan dengan dunia usaha dan pelibatan organisasi sosial masyarakat. Apabila dibandingkan dengan pencapaian pemenuhan IKK ini pada tahun 2022 sebelumnya, maka pencapaian pada tahun 2023 ini sebenarnya mengalami penurunan, sebab pada tahun 2022 terdapat penetapan target untuk indikator kinerja kegiatan ini lebih tinggi daripada target tahun 2023, yaitu nilai indeks 2,6 pada tahun 2022 dan nilai indeks 2,52 pada tahun 2023. Demikian pula halnya dengan realisasi pencapaiannya. Pada tahun 2022 nilai indeks untuk indikator kegiatan ini berada pada nilai IKKR 2,88 sedangkan pada tahun 2023 berada pada nilai IKKR 2,80. Kemudian, implementasi kegiatan pada Bidang Rehabilitasi juga merupakan wujud penerapan strategi *soft power approach* yang dilakukan oleh BNN. Strategi *soft power approach* adalah pendekatan yang menitikberatkan pada aktivitas rehabilitasi dan pencegahan yang bertujuan agar masyarakat memiliki ketahanan diri dan daya tangkal terhadap penyalahgunaan Narkoba (Dewi et al., 2022; B. M. Putra & Astika, 2023). Strategi ini dilaksanakan dalam bentuk Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) yang gencar dikampanyekan oleh BNN. Selain itu BNN juga melaksanakan upaya rehabilitasi bagi para pecandu atau korban penyalahgunaan Narkoba dimana aksesibilitas layanan rehabilitasi juga dilakukan melalui Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Rehabilitasi terhadap pecandu Narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan dan masa menjalani rehabilitasi tersebut akan diperhitungkan sebagai bagian dari masa menjalani hukumannya (Endri & Riskio, 2024; Pusparini & Boer, 2023; Septia et al., 2022). Rehabilitasi terhadap pecandu Narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan Narkoba sebab rehabilitasi sebagai langkah pemulihan untuk bebas dari Narkoba (Lolong et al., 2020).

Keberhasilan implementasi P4GN oleh BNN Provinsi Kalimantan Timur untuk pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba tidak hanya penting melalui pemenuhan sasaran kegiatan meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi Narkoba, melainkan juga pada pemenuhan sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi Narkoba di Klinik Rehabilitasi. Adapun capaian indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 102,5 persen, yang diperoleh dari hasil survei terhadap residen, keluarga residen dan masyarakat setempat sekitar tempat layanan rehabilitasi. Kenaikan target untuk butir indikator ini terjadi dimana pada tahun 2022 target nilai indeksnya adalah 3,4 sedangkan pada tahun 2023 targetnya menjadi 3,60. Walaupun temuan penelitian adalah daya tampung Balai Rehabilitasi Tanah Merah masih terbatas akibat hanya berkapasitas untuk 300 orang, sedangkan jumlah kasus Narkoba yang dapat melibatkan penyalahguna dan/atau pecandu hingga akhir tahun 2023 dilaporkan oleh Kapolda Kaltim meningkat sebanyak 230 kasus atau 13 persen. Dibandingkan tahun 2022, jumlah kasus adalah 1.480. Maka, di tahun 2023 justru menjadi 1.710 kasus (dalam <https://kaltim.tribunnews.com>). Berikutnya, untuk implementasi kegiatan pada Bidang Rehabilitasi dapat dikatakan juga merupakan wujud penerapan strategi *hard power approach* yang dilakukan oleh BNN. Strategi *hard power approach* dikatakan oleh Daud (2023) dimaknai

sebagai pendekatan yang menitikberatkan pada pemberantasan, dalam hal ini berkenaan dengan penegakan hukum yang tegas dan terukur. Dalam strategi ini, BNN berkolaborasi dengan aparat penegak hukum dalam hal melakukan tindakan tegas bagi para pelaku kejahatan tindak pidana Narkoba melalui pemberian sanksi hukum yang setimpal, dari adanya pengungkapan jaringan sindikat yang telah berhasil dipetakan. Dalam pelaksanaan P4GN, BNN mengkombinasikan strategi *hard power approach* dengan strategi *smart power approach*. Strategi *smart power approach* dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal di era digital dalam rangka mendukung upaya P4GN di Indonesia. Penggunaan berbagai alutsista berbasis digital dan pemanfaatan berbagai bentuk teknologi informasi lainnya tentu sangat mendukung dalam kegiatan pemetaan hingga pemberantasan jaringan peredaran gelap Narkoba dan prekursor Narkoba (Nurmalita & Megawati, 2022; D. S. Putra, 2022).

Dalam strategi *hardpower approach* BNN juga melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan Program *Alternative Development* yang membantu masyarakat yang berada di kawasan rawan Narkoba agar memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kawasan rawan Narkoba. Pengukuran untuk nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan termasuk kompleks, sebab mencakup kondisi tidak terjadinya segala gangguan bagi tahanan yang dapat mengganggu proses penyidikan perkaranya. Kondisi-kondisi itu antara lain seperti tahanan kabur, perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian, juga hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas di lingkungan Rumah Tahanan BNN Provinsi Kalimantan Timur. Untuk melaksanakan upaya-upaya penciptaan keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan tersebut, maka BNN Provinsi Kalimantan Timur berkoordinasi dan bekerjasama dengan petugas Rumah Tahanan, Kementerian Hukum dan HAM serta Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Catatan penting dari evaluasi BNN Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023, didapati bahwa fasilitas di Rumah Tahanan BNN Provinsi Kalimantan Timur memerlukan renovasi pada ruang tahanan maupun pada ruang MCK (Mandi, Cuci, Kakus) nya. Selain itu, diperlukan penambahan personil bidang kesehatan pada Rumah Tahanan BNN Provinsi Kalimantan Timur. Maka, upaya penciptaan nilai kesehatan tahanan masih perlu ditingkatkan. Sedangkan pengukuran untuk nilai tingkat keamanan barang bukti Narkotika dan non Narkotika terdiri dari keutuhan dan/atau kondisi penyusutan secara wajar (alamiah atau kimiawi) pada barang bukti Narkotika dan non Narkotika. Sangat penting untuk mendokumentasi data kondisi awal barang bukti pada saat diterima penyidik dengan kondisi pada waktu barang bukti tersebut dikeluarkan untuk proses pemusnahan atau diserahterimakan untuk tahap penuntutan perkara. Kedua indikator ini sama-sama mencapai target 100 persen, dengan adanya mekanisme yang jelas dan prosedural sesuai *Standard Operational Procedure (SOP)* pengamanan barang bukti. Jumlah berita acara barang bukti di lingkup BNN Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 berjumlah lebih banyak daripada jumlah berita acara barang bukti pada tahun 2022. Dimana pada tahun 2023 terdapat 37 berita acara barang bukti, sedangkan pada tahun 2022 terdapat 26 berita acara.

Keberhasilan implementasi P4GN oleh BNN Provinsi Kalimantan Timur tercapai dari pemenuhan sasaran meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kinerja vertikal, dengan satu IKK yaitu Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal sebesar 101,6 persen. Zona Integritas sebagai predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan Pemerintah Daerah yang mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) menjadi hal yang penting untuk dicapai, termasuk oleh BNN di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Keberadaan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas BNN Provinsi Kalimantan Timur yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Zona Integritas dengan disertai pemutakhiran Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas serta *monitoring* secara rutin pada masing-masing Kelompok Kerja tentu menjadi faktor pendukung utama dalam pencapaian kinerja pada indikator nilai Zona Integritas BNN.

Namun demikian, upaya P4GN di Provinsi Kalimantan Timur akan dapat dilakukan secara lebih masif dan optimal apabila tersedia kantor BNN pada seluruh wilayah Kabupaten. Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki tujuh wilayah Kabupaten dan tiga wilayah Kota. Apabila ketujuh Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur memiliki kantor BNN maka implementasi P4GN akan dapat lebih menjangkau seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur untuk bersih Narkoba. Sebagaimana pada wilayah Provinsi Jawa Timur, kantor BNN telah menyebar di banyak wilayah Kabupaten maupun Kotanya (Kencana dkk, 2016) sehingga upaya P4GN senantiasa dapat memberi sumbangsih bagi tertanganinya kasus-kasus Narkoba setiap tahunnya. Demikian pula halnya dengan diperlukannya penambahan fasilitas rehabilitasi untuk penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba. Sudah waktunya Pemerintah Pusat melalui BNN mengutamakan penyediaan fasilitas yang lebih baik untuk implementasi P4GN agar dapat mencapai raih kinerja yang lebih baik demi membasmi Narkoba dalam kehidupan bangsa dan negara. Dengan

demikian, maka BNN Provinsi Kalimantan Timur telah merealisasikan upaya P4GN dalam berbagai kegiatan sesuai dengan penetapan dalam Perjanjian Kinerja. Dari 20 target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terdapat 11 indikator yang melebihi target, tujuh indikator yang memenuhi target dan dua indikator yang tidak memenuhi target. Secara keseluruhan, pencapaian kinerja BNN Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 dalam upaya P4GN adalah sebesar 98,54 persen. Namun demikian, beberapa target IKK dalam rangka implementasi P4GN yang ditetapkan BNN Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2023 lebih rendah daripada target yang ditetapkan pada tahun 2022. Tentu hal ini sesungguhnya mempengaruhi optimalisasi implementasi P4GN di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Terutama pada indikator jumlah kawasan rawan di wilayah Provinsi yang beralih status dari Bahaya menjadi Waspada untuk pemenuhan sasaran upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan Narkoba secara berkelanjutan. Sebagaimana implementasi P4GN di wilayah lain (Nurlatifah et al., 2022; Nurmalita & Megawati, 2022). BNN wilayah Provinsi, Kabupaten maupun Kota telah melaksanakannya, namun selalu masih terdapat keterbatasan dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan Narkoba pada setiap tahunnya. Maka keberhasilan implementasi P4GN memang seyogyanya tidak hanya bertumpu di BNN semata, melainkan juga membutuhkan kolaborasi dengan para pihak, mulai dari masyarakat, swasta, akademisi, dan sebagainya demi menciptakan bangsa yang bebas dan bersih Narkoba.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Provinsi Kalimantan Timur merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2022 dan telah terlaksana secara akuntabel, efektif dan efisien. Dalam upaya P4GN, BNN Provinsi Kalimantan Timur juga menyediakan rehabilitasi rawat jalan bagi para pecandu Narkoba dan fasilitas rawat inap di Balai Rehabilitasi. Namun demikian, daya tampung Balai Rehabilitasi masih terbatas akibat hanya berkapasitas untuk 300 orang, sedangkan jumlah kasus maupun jumlah penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba hingga akhir tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Belum tersedianya kantor BNN di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur mengakibatkan hambatan dalam komunikasi antara BNN Pusat dengan BNN wilayah di Kabupaten/Kota pada implementasi P4GN. Disamping itu, terdapat keterbatasan anggaran dan SDM Bagian Lapangan dan Bidang Umum pada BNN Provinsi Kalimantan Timur untuk kegiatan sosialisasi, terutama untuk kegiatan penyuluhan. Temuan penelitian ini memunculkan beberapa rekomendasi BNN Pusat perlu segera menyediakan BNN pada tiap wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur guna kelancaran komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dalam implementasi P4GN di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi 10 Kabupaten/Kota. Untuk meningkatkan upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba agar mengalami peningkatan kualitas hidup, kapasitas teknis dan wawasan petugas layanan atau konselor Rehabilitasi bagi para penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba perlu ditingkatkan secara lebih pesat dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan klien, terutama untuk tersertifikasi kompetensi teknisnya. Fasilitas Balai Rehabilitasi Tanah Merah BNN Kota Samarinda juga perlu ditingkatkan dari segi kapasitas ruang.

5. DAFTAR RUJUKAN

- Dewi, E., Ulfa, K., & Safirussalim, S. (2022). Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Narkotika Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, 7(2), 143–156. <https://doi.org/10.22373/jai.v7i2.1659>.
- Endri, E., & Riskio, R. (2024). Evaluasi Efektivitas Program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(3), 202–213. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.531>.
- Latifah, N., & Maesaroh, M. (2020). Efektivitas Program Pencegahan Penanganan Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkotika (P4gn) Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 9(1), 374–390. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v9i1.26451>.
- Lolong, C. R., Sambiran, S., & Pangemanan, F. (2020). Strategi Badan Narkotika Nasional (Bnn) Di Kota Manado Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika. *Jurnal Eksekutif*, 2(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/29675>.
- Nurlatifah, A., Mulyadi, A., & Meigawati, D. (2022). Efektivitas Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3377–3390. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i10.1331>.

- Nurmalita, A., & Megawati, S. (2022). Implementasi kebijakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya. *Publika*, 1111–1122. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n4.p1111-1122>.
- Pusparini, F., & Boer, K. M. (2023). Implementasi Cyber Public Relations BNN Provinsi Kalimantan Timur dalam Upaya Mengedukasi Masyarakat Mengenai P4GN. *Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi)*, 7(4), 769–784. <https://doi.org/10.35870/jtik.v7i4.2086>.
- Putra, B. M., & Astika, C. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika) bidang Pencegahan di Kota Bengkulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 137–152. <https://doi.org/10.25299/jiap.2023.13518>.
- Putra, D. S. (2022). Pemberdayaan duta anti narkoba Kota Malang melalui pelatihan dalam upaya peningkatan pengetahuan P4GN. *Altruis: Journal of Community Services*, 3(2), 30–33. <https://doi.org/10.22219/altruis.v3i2.20907>.
- Septia, W., Lestari, S., & Nasution, A. I. L. (2022). Manajemen Rehabilitasi Rawat Jalan Penyalahgunaan Narkoba BNNP Sumut. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2), 781–786. <https://doi.org/10.36987/ebma.v3i2.3565>.
- Wahyudin, Y. A., & Sood, M. (2022). Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dengan ASEAN Senior Officials on Drugs Matters ASOD Dalam Menangani Kejahatan Narkoba Di Indonesia Tahun 2018-2021. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 4(2), 73–95. <https://doi.org/10.29303/ijgd.v4i2.40>.
- Yuliandrie, A., & Yuliati, Y. (2023). Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bengkulu Dalam Mengkampanyekan Informasi P4GN Kepada Masyarakat Kota Bengkulu. *Communicator Sphere*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.55397/cps.v3i1.33>.